

PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PRAKTEK TIDAK SEHAT DALAM TATA KELOLA KEUANGAN KOPERASI

Agus Wahyudin, Dwi Cahyaningdyah, Niswah Baroroh

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Email: aguswahyudin2001@yahoo.com

Abstract. Community service was held in Semarang, Semarang Dekopinda with participants in the Large-Scale Cooperative pengurusan supervisors who are not eligible to be audited externally with the aim of empowering role socialization and cooperative supervisory functions throughout the city of Semarang. This training is expected to improve the quality of the Internal Control System (SPI) Cooperative members Dekopinda Semarang in order to minimize the occurrence of fraud (fraud) that occurred in the cooperative. Moreover, it can increase the awareness of administrators that require cooperative role of external auditors in order to increase the credibility and accountability of the financial statements he made, related to the interests of the members as a key stakeholder in this enterprise, since not all members act as stewards. This socialization should be followed by a follow-up agenda related to the strengthening of the Internal Control System (SPI) Cooperative members Dekopinda Semarang. This service is done with the purpose to provide technical training on the role of the Internal Control System (SPI) in order to minimize the occurrence of fraud (fraud) conducted by top managers, the managers of cooperatives and cooperative supervisors. With the creation of a good SPI operations to ensure the company runs with good and true, thus helping increase the credibility of the financial statements and are not directly improve the quality of financial statements themselves.

Keywords: *SPI, Financial Governance, Cooperative*

Abstrak. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di wilayah Semarang, di Dekopinda Semarang dengan peserta para pengurusan pengawas Koperasi Berskala Besar yang sudah layak untuk diaudit eksternal dengan tujuan sosialisasi pemberdayaan peran serta fungsi pengawas koperasi se kota semarang. Adanya pelatihan ini diharapkan meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Koperasi anggota DEkopinda Kota Semarang agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) yang terjadi di koperasi. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran pengurus bahwa koperasi membutuhkan peran auditor eksternal guna meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang dibuatnya, terkait adanya kepentingan dari para anggota selaku stakeholder utama dalam badan usaha ini, mengingat tidak semua anggota berperan sebagai pengurus. Sosialisasi ini hendaknya diikuti dengan agenda follow up terkait penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Koperasi anggota Dekopinda Kota Semarang. Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan teknis

mengenai peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh top manajer, para pengurus koperasi maupun para pengawas koperasi. Dengan terciptanya SPI yang baik guna memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik dan benar, sehingga membantu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan secara tidak langsung meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.

Kata Kunci: SPI, Tata Kelola Keuangan, Koperasi

PENDAHULUAN

Secara alamiah koperasi sesungguhnya memiliki berbagai kelebihan dalam bentuk keunggulan komparatif dalam persaingan dibandingkan dengan rancang bangun badan usaha lain di Indonesia. Keunggulan kooperatif koperasi terbangun dari jumlah anggota sebagai pangsa pasar, berbagai fasilitas kredit program dengan biaya rendah yang ditawarkan pemerintah melalui anggaran maupun penyisihan laba BUMN, akses terhadap program pendidikan dan latihan dari berbagai institusi dan lain sebagainya. Karakteristik fungsi sosial yang melekat pada koperasi yang tidak semata-mata mementingkan orientasi keuntungan, menempatkannya sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Sebagai rancang bangun badan usaha yang paling sesuai dengan sistem perekonomian pancasila sungguh disayangkan koperasi belum mampu menjadi pemeran utama dalam kancah perekonomian Indonesia. Posisinya masih kalah dibandingkan dengan perusahaan milik perseorangan dan perusahaan milik negara.

Gagasan-gagasan baik yang melekat pada koperasi sebagai rancang bangun badan usaha yang ideal di Indonesia, belum mampu menempatkannya sebagai bangun usaha utama setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Sebab pertama adalah lemahnya manajemen dan tata kelola koperasi khususnya dalam hal sistem pengendalian intern. Sebab kedua adalah belum terbangunnya rasa memiliki dikalangan anggota koperasi sehingga tak jarang anggota malah memilih jasa atau produk yang disediakan oleh lembaga selain koperasi.

Sebab ketiga adalah belum mempunya koperasi mentransformasi keunggulan kooperatifnya menjadi keunggulan kompetitif karena lemahnya jiwa kewirausahaan para pengurus, sehingga koperasi yang seharusnya menyediakan barang dan jasa dengan tingkat harga yang lebih rendah tidak jarang malah menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari para pesaingnya. Lemahnya sistem pengendalian intern dalam manajemen koperasi terbukti telah banyak mengakibatkan koperasi berguguran karena tindak kecurangan dan ketidakberesan yang dilakukan oleh pengelola. Kebangkrutan sebuah koperasi karena tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengelola akan berdampak pada ketidakpercayaan anggota koperasi pada suatu kawasan tertentu. Jika ini terjadi usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Pengendalian intern yang dipahami sebagai usaha manajemen dalam menjaga aktiva (kekayaan) organisasi melalui penerapan prosedur tertentu bekerja melalui tiga dimensi dalam menjaga aktiva perusahaan. Pengendalian intern yang baik dan disertai praktek-praktek yang sehat dalam tata kelola keuangan akan menjaga kekayaan perusahaan secara preventif, detektif dan korektif. Penerapan sistem pengendalian intern dalam kerangka pengelolaan koperasi sesungguhnya dapat dilakukan dengan mudah melalui penerapan sistem dan prosedur serta pemisahan wewenang dan tanggung jawab serta menempatkan kelembagaan pengawas, pengurus, pengelola dan karyawan pada porsi wewenang dan tanggungjawabnya masing-

masing.

Hingga saat ini, sektor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi sandaran perekonomian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia juga diserap atau menggantungkan hidupnya di sektor ini. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah UMKM dan Koperasi yg sangat besar sekali. Jumlah UMKM ini meningkat sebesar 2,02 persen dari 53.823.732 unit pada tahun 2011. Sementara diprediksikan jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101.722.458 orang atau meningkat 3,55 persen dari sebanyak 99.401.775 orang pada tahun 2010. Demikian pula dengan koperasi, adanya peningkatan jumlah koperasi sebanyak 5,7 persen, dari 177.482 unit pada tahun 2010 menjadi 187.598 unit pada September 2011. Dengan membukukan total volume usaha mencapai Rp 77,514 triliun, serta modal sendiri Rp 30, 656 triliun. Jika dibandingkan tahun 2008, terdapat peningkatan sebesar 13%, sedang jumlah anggota 6,61%. Lebih lanjut, Kementerian Koperasi dan UKM juga menyatakan dalam tahun ini berhasil merealisasi 100% kinerjanya. Penguatan modal pun terjadi sekitar 1.370 koperasi di seluruh Indonesia yang dialokasikan sekitar Rp68,5 miliar. Perkembangan ini berdampak positif bagi penyerapan dan peningkatan tenaga kerja. Jumlah anggota koperasi aktif pun meningkat 0,96 persen, dari 30.461.121 orang pada tahun 2010 menjadi 30.752.658 orang pada September 2011. Perkembangan ini berdampak positif bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 4,99 persen, dari 358.768 tenaga kerja pada tahun 2010 menjadi 376.680 tenaga kerja pada September 2011. Dengan melihat prosentase ini, maka tidak diragukan lagi bahwa Koperasi memiliki kontribusi baik secara ekonomis ataupun non ekonomis terhadap berjalannya pemerintahan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas

maka Kementerian Koperasi dan UKM melakukan inventarisasi jumlah koperasi di Indonesia dalam rangka revitalisasi fungsi dan peran badan usaha tersebut dalam pembangunan. Inventarisasi koperasi ini dilakukan untuk mengetahui peta koperasi di Indonesia, termasuk melakukan pendampingan bagi koperasi untuk melakukan merger atau amalgamasi. Dibalik peningkatan jumlah koperasi yang cukup signifikan sebesar 5,7% tersebut ternyata kurang lebih 27% kondisinya tidak berjalan dan gulung tikar. Penyebab koperasi gulung vakum adalah salah urus, dibentuk hanya untuk mendapatkan program kredit dan yang paling dominan koperasi dililit utang akibat salah urus manajemen.

Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) dalam penilaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun ini mengumumkan kuantitas koperasi memang meningkat, akan tetapi banyak terjadi penyimpangan operasional yang ditemui di sejumlah wilayah di Indonesia. Ribuan koperasi yang harus ditindak tegas karena melakukan berbagai pelanggaran serius, salah satunya pelayanan kepada anggota nonkoperasi. Penyimpangan ini juga memungkinkan para pengurus koperasi bisa menggelapkan dana nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian tindakan strategis untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Salah satu hal yang mutlak diperlukan dan merupakan salah satu syarat dari koperasi berkualitas adalah implementasi GCG. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan mekanisme yang mengatur hubungan antara, pengelola, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola keuangan atau *Corporate Governance (CG)* ialah untuk menciptakan nilai tambah

bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan keorganisasian koperasi memang seharusnya dilaksanakan seluruhnya, karena jika prinsip-prinsip tersebut terlaksana dengan baik maka hasil dari pemeriksaan terhadap kinerja organisasi koperasi yang dilakukan oleh seorang auditor akan melaporkan keberadaan organisasi koperasi baik itu dalam segi finansial ataupun tingkat kesehatannya dalam kategori yang tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan.

Sistem GCG ini telah marak diaplikasikan baik pada entitas publik maupun entitas privat. Indikator GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal terkait konsep GCG atau tatakelola koperasi yang baik. Konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian dan perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya. Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pertama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi, misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan akuntabel. Untuk mewujudkan GCG dalam suatu institusi termasuk koperasi pada kenyataannya mengalami banyak kendala. Fenomena yang sering terjadi di lapangan yaitu laporan yang dibuat oleh

manajemen baik itu laporan keuangan ataupun laporan non keuangan cenderung cenderung tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang diantaranya adalah adanya ketidakjujuran yang dimiliki oleh penyusun laporan keuangan sehingga sering terjadi pemanipulasian data yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan kadang kelemahan tersebut ditunjang pula oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang standar pembuatan laporan keuangan tersebut baik penyusunnya maupun penggunaannya.

Perkembangan koperasi di Kota Semarang dalam hal kuantitas dalam lima tahun terakhir sangat tinggi. Mencermati tingginya jumlah koperasi bentukan di Kota Semarang yang berisiko tinggi mengalami masalah akibat lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan praktek-praktek yang tidak sehat maka Tim Pengabdian Universitas Negeri Semarang bermaksud untuk melakukan pemberdayaan koperasi melalui penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Sebagai upaya Meminimalisir Praktek Tidak Sehat Dalam Tata Kelola Keuangan Koperasi se Kota Semarang.

Pengurus (manajemen puncak) koperasi sangat berkepentingan memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer dan para personel (karyawan) berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengurus sangat perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas aktivitas bawahannya. Pengendalian sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan tetap dapat dicapai. Karena itu pula, fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen yang lain (perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan). Luasnya kegiatan usaha koperasi mengakibatkan pengurus (manajemen puncak) tidak dapat mengawasi

atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan atau aktivitas koperasi. Untuk itu, pengurus harus mendesain dan membangun suatu sistem pengendalian yang memadai. Salah satu pengendalian yang perlu dibangun adalah pengendalian intern.

Pengendalian intern berkaitan dengan upaya meningkatkan keandalan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan kepatuhan para manajer dan personel terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas. Peningkatan keandalan informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan sangat penting artinya bagi pengurus, karena semua aktivitas operasi koperasi akan berdampak pada keuangan, dan karena itu akan tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai dua fungsi pokok. Pertama sebagai media pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dan kreditur, yang menanamkan atau menginvestasikan modalnya di koperasi. Kedua, laporan keuangan merupakan informasi penting bagi pengurus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Bilamana informasi akuntansi dalam laporan keuangan tidak handal, dapat dipastikan bahwa penilaian kinerja pengurus oleh anggota dan kreditur juga tidak akan handal, dan keputusan manajerial yang didasarkan atas laporan keuangan juga menjadi tidak handal. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi pengurus untuk mendesain dan membangun pengendalian intern yang memadai, serta mengimplementasikannya dengan baik dan sungguh-sungguh.

Substansi permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang merupakan permasalahan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Dampak dari kebangkrutan sebuah koperasi akibat praktek-praktek yang tidak sehat dari pengelola akan merugikan koperasi yang bersangkutan dan merugikan bagi pencitraan koperasi dalam arti yang lebih luas. Sebagian besar koperasi yang bermasalah

dalam artian terjadi tindak kecurangan atau praktek yang tidak sehat oleh pengelola terjadi pada situasi sistem pengendalian intern yang lemah. Untuk itu dengan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya sistem pengendalian intern yang membahas juga topic bagaimana pengendalian intern yang baik diterapkan pada koperasi diharapkan mampu menekan atau mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat serta kecurangan yang dilakukan oleh pengelola koperasi.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang muncul di kalangan para pengelola koperasi, maka diperlukan metode pendekatan yang sesuai agar tujuan dapat tercapai. Berdasarkan identifikasi awal, maka alternatif yang paling optimal adalah adanya sosialisasi yang diikuti dengan bentuk pendampingan terhadap para pengelola koperasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka metode yang digunakan adalah metode pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, artinya pendekatan ini melakukan pengkajian wilayah secara partisipatif. Adapun secara istilah adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong para pengelola koperasi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai kondisi kehidupan mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana tindakan yang sesuai dengan wilayahnya. Pengertian di atas menunjukkan bahwa pada pelaksanaan PRA, masyarakat difasilitasi oleh orang luar seperti pengabdian, donor atau petugas agar mampu menganalisis kondisi kehidupannya mencakup potensi dan permasalahan yang ada di lingkungannya. Kemudian mereka difasilitasi untuk dapat menyusun program berdasarkan potensi yang ada di lingkungannya dan potensi yang ada di luar lingkungannya, tetapi ada kemungkinan bisa di manfaatkan oleh masyarakat guna

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.

Proses Umum Penerapan PRA meliputi kegiatan: (1) Persiapan seperti, membentuk Tim PRA, menetapkan Tujuan PRA, membentuk Desain Kegiatan PRA, melakukan Kunjungan awal: (2) Pelaksanaan PRA seperti, pembahasan, maksud, tujuan dan proses PRA, diskusi Penggalan Informasi, pencatatan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, menyusun Rencana Program: (3) Analisis Wilayah meliputi kegiatan, observasi lapangan, studi dokumentasi, struktur dan perubahan sosial, topografi, demografi, wawancara, identifikasi dan rumusan masalah dan penyusunan Rencana Kegiatan. Rencana kegiatan yang dilakukan selama periode pengabdian dapat dilihat pada tabel 1.

Evaluasi dilakukan selama proses kegiatan dan setelah kegiatan berakhir. Selama proses kegiatan, akan dilakukan diskusi yang akan digunakan untuk mengukur keterserapan dari kegiatan pelatihan terkait dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI0 Koperasi. Sedangkan evaluasi setelah akhir kegiatan akan dilakukan dengan menyebarkan angket mengenai ketertarikan dan keterserapan materi pelatihan. Kriteria dan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kegiatan ini adalah jika peserta mampu untuk mendiskripsikan kriteria

yang disyaratkan oleh UU RI No 25 tahun 1992, maka di anggap bahwa peserta telah memahami materi pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat ini secara umum digolongkan menjadi dua yaitu berupa kehadiran dan ketekunan peserta.

Peserta pelatihan adalah para pengurus serta pengawas koperasi anggota Dekopinda Kota Semarang. Kegiatan dilaksanakan di gedung Dekopinda Kota Semarang lantai 2.

Kegiatan pengabdian yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 14 September 2013, dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) pengurus serta pengawas koperasi serta 13 orang panitia baik dari Universitas Negeri Semarang maupun dari pengurus Dekopinda Kota Semarang.

Mengenai ketekunan peserta dalam pelatihan ini secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Selama diadakan kegiatan, peserta tampak antusias dan aktif dalam mengikuti pelatihan. Mereka dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan yang baginya merupakan hal baru. Hal-hal yang disampaikan oleh penyaji ditanggapi secara aktif dengan Tanya jawab dan diskusi.

Tabel 1. Rencana Kegiatan

Tahapan	Keterangan
Persiapan	Perijinan Analisis masalah berdasarkan observasi dan koordinasi dengan Dinas Koperasi khususnya Dekopinda Kota Semarang Membuat rencana kegiatan pendampingan, memfasilitasi dan pelatihan.
Pendampingan dan Memfasilitasi	Sosialisasi Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Koperasi Pelatihan Terkait SPI
Pelaporan	Laporan Pendahuluan Laporan Interim Laporan Akhir Ringkasan Eksekutif Kontrak Berakhir

Keluhan dan kesulitan yang dihadapi, disampaikan oleh pengurus dan pengawas serta ditanggapi dan diberikan solusi oleh penyaji dengan penjelasan singkat, sederhana namun tepat sasaran. Melalui penjelasan dari penyaji maka peserta diharapkan dapat mengaplikasikannya.

Pembahasan

Sosialisasi serta pelatihan terkait penguatan sistem pengendalian intern (SPI) sebagai upaya meminimalisir praktik tidak sehat dalam tata kelola keuangan koperasi se Kota Semarang ini dilaksanakan di kantor Dekopinda Semarang dengan peserta para pengurus koperasi berskala besar, sesuai dengan kepentingan pengauditan. Pemilihan peserta ini diserahkan sepenuhnya kepada Dekopinda dengan anggapan bahwa Dekopindalah yang paling mengetahui kondisi koperasi-koperasi anggotanya.

Para peserta menyambut baik sosialisasi ini karena beberapa di antaranya baru mengetahui pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di organisasinya serta unsur-unsur yang relevan membentuk Sistem Pengendalian Internal yang baik. Selain itu beberapa koperasi juga baru mengetahui bahwa seharusnya koperasinya sudah layak untuk diaudit, tetapi belum dilaksanakan prosedur audit seperti yang seharusnya. Peserta juga antusias dalam pelaksanaan diskusi beberapa di antaranya melakukan sharing atas apa yang terjadi di lapangan kepada nara sumber yang memang sudah pakar di bidang audit.

Pada prinsipnya kegiatan pengabdian mengenai pemberdayaan peran dan fungsi pengawas koperasi anggota Dekopinda Kota Semarang telah berlangsung dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat kegiatan. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan dapat kami jelaskan

sebagai berikut:

1) Faktor Penghambat

Para pengurus dan pengawas masih banyak yang belum memahami pentingnya penguatan atas Sistem Pengendalian Interna (SPI)

Para pengurus dan pengawas banyak menghadapi masalah terutama terkait dengan mewujudkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik

Banyak terjadi Fraud (kecurangan) di koperasi akibat kurang baiknya SPI dan pemahaman para pengurus serta pengawas koperasi atas penguatan SPI

Waktu pelaksanaan yang terlalu singkat karena bersamaan dengan agenda yang lain, sehingga kesempatan tanya jawab kurang memadai.

2) Faktor Pendukung

Adanya dukungan dari Kepala serta seluruh pengurus Dekopinda atas penunjukan peserta pelatihan, penyediaan tempat serta konsumsi.

Dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dekopinda Kota Semarang

Dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Universitas Negeri Semarang

Antusiasme para peserta pelatihan dalam mengikuti kegiatan pelatihan menjadi suatu semangat luar biasa bagi penyaji.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengabdian masyarakat ini diikuti oleh pengurus koperasi berskala besar di wilayah Semarang yang pada umumnya sudah memenuhi kriteria untuk diaudit sesuai Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351 /KEP/M/ XII/ 1998 dengan omset lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Sosialisasi dan pelatihan ini sangat penting bagi para pengurus koperasi ini, terkait penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

koperasi agar dapat meminimalisir terjadinya fraud (kecurangan) di koperasi. Selain itu perlu juga pengoptimalan peran eksternal audit bagi kualitas laporan keuangan koperasi yang auditable dan secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Secara kualitas dan kuantitas, laporan keuangan ini bisa dibuktikan keandalannya sehingga bisa lebih dipercaya oleh para anggota selaku *stakeholder* utama dalam badan usaha ini.

Saran

Berdasar kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang bisa direkomendasikan sebagai berikut :

1) Koperasi hendaknya mampu untuk meningkatkan pengoptimalan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Koperasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bisa teruji keandalannya.

2) Pengabdian selanjutnya hendaknya memberikan pelatihan kepada para pengawas koperasi untuk mengimplementasikan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam rangka meminimalisir terjadi penyimpangan (fraud) di koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim 2001, Auditing 1 (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: AMP YKPN.

Agoes. Sukrisno. 1999. Auditing. Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik. Buku I. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

_____. 1999. Auditing. Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik. Buku II. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Akmal. 2006. Pemeriksaan Intern. Indeks. Kelompok Gramedia. Jakarta

Bambang Hartadi. 1999. Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen Dan Audit. Yogyakarta: BPFE

Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. Standar Profesional Akuntan Publik. Yogyakarta: Gabian Penerbit STIE-YKPN.

IBM Bhayangkara. 2008. Management Audit. Prosedur dan Implementasi. Salemba Empat. Jakarta

Jogiyanto. 2000. Sistem Informasi Berbasis Komputer. Edisi kedua. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Joseph W. Wilkinson, Joseph. (Marianus Sinaga). 1995. Sistem Akuntansi dan Informasi. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Airlangga.

Kementrian Koperasi dan UK & M RI. 2002. *Himpunan Kebijakan Koperasi dan UKM Dibidang Akuntabilitas*. Jakarta. Dep. Kop.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat

_____. 2002. Auditing. Buku I. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta

_____. 2002. Auditing. Buku II. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta

Munawir. 1999. Auditing Modern. Buku I. BPFE Yogyakarta

_____. 1999. Auditing Modern. Buku I. BPFE Yogyakarta

Sawyer dkk. 2006. Internal Auditing. Buku I. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta

_____. 2006. Internal Auditing. Buku II. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta

_____. 2006. Internal Auditing. Buku III. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta

Siagian. Sondang. 1999. Audit Manajemen. Bumi Aksara

Tunggal. Amin W. 2008. Memahami Internal Auditing. Harvarindo

Tunggal. Amin W. 2000. Management Audit

- Suatu Pengantar. Rineka Cipta. Jakarta
Tunggal, Wijaya Amin. 1995. *Struktur
Pengendalian Intern*. Jakarta: Rineka
Cipta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992. *Undang-Undang Pokok
Perkoperasian*. J a k a r t a :
Penerbit Arikha Media Cipta.
- Yusuf, Al Haryono. 2001. *Auditing
(Pengauditan)*. Yogyakarta: Penerbit
STIE YKPN.
- Wijono, Struktur Pengendalian Intern untuk
Koperasi, disampaikan dalam
Penyuluhan di Kantor Dinas Koperasi
Kota Malang, 29 Juli 2004.